



PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Gladys Dwika Aprilia

gladysdwika26@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi

Puja Rizky Ramadhan

pujarizky@dosenpancabudi.ac.id

Universitas Pembangunan Panca Budi

Korespondensi penulis: *gladysdwika26@gmail.com*

Abstract. *The research analysis aims to determine the effect of the implementation of financial-based accounting and internal control systems on the accountability of government agency performance at the State Asset Management Institute. The data analysis technique used is an associative research method with the help of the SPSS version 19 program. This research uses multiple linear regression analysis. The sample in this study was 92 respondents. Primary data collection uses a questionnaire. The research results show that the tcount value is 3.324 > ttable of 1.98 with a significant value of 0.001 < 0.05, so the hypothesis H1 is accepted and H0 is rejected, meaning that accounting standards have a partially positive and significant effect on the accountability of the performance of government agencies at the State Asset Management Institute. The test results show a tcount value of 4.554 > ttable of 1.98 with a significant value of 0.000 < 0.05, so hypothesis H2 is accepted and H0 is rejected, meaning that the internal control system has a positive and partially significant effect on the accountability of government agency performance at the Asset Management Institute Country. The research results show that accrual-based accounting and internal control systems have a positive and significant effect on performance accountability with a calculated F value of 16.521 which is greater than 3.10 and a significant value of 0.000 which is smaller than 0.05.*

Keywords: *Accrual Based Accounting and Internal Control System and Performance Accountability*

Abstrak. Analisis penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan bantuan program SPSS versi 19. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 responden. Pengambilan data primer menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,324 > t_{tabel} sebesar 1,98 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05, maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Hasil pengujian menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,554 > t_{tabel} sebesar 1,98 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka hipotesis H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai dari F hitung sebesar 16,521 yang lebih besar dari 3,10 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Kata Kunci : Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Kinerja

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik adalah cara pengelolaan negara dan penyelenggaraan

pemerintahan yang memenuhi karakteristik *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness*, dan *accountability*. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua unsur pokok dalam mewujudkan *good government governance* (Mardiasmo, 2018). Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah berdasarkan pada sasaran yang telah direncanakan melalui suatu sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pembentukan sistem pertanggungjawaban ini tidak lepas dari tujuan utama pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang sering disebut dengan *good governance* (Manullang dan Abdullah, 2019).

Pengelolaan keuangan yang akuntabel akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari publik atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Sementara itu di pihak penyelenggara akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Putra dkk, 2019).

Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang disampaikan secara periodik. Akuntabel berarti bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat penyelenggara pemerintahan baik dalam membuat kebijakan maupun dalam mengatur dan membelanjakan keuangan negara harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas (Logos, 2017). Sebaliknya, transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa didukung dengan akuntabilitas.

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang pencatatannya menggunakan basis akrual, akan mengakui pendapatan, beban, asset, hutang, dan ekuitas di dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diperoleh ini yaitu, mempermudah tugas pemerintah di dalam mengevaluasi pada laporan keuangan, sekaligus pada kinerja pemerintah, terutama terhadap sumber daya manusia (SDM) (Pangemanan, S., & Pinatik, 2015).

Basis akrual adalah konsep pengakuan akuntansi yang didasarkan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi tanpa memperhatikan saat terjadinya aliran kas masuk atau aliran kas keluar dari transaksi tersebut. Dengan kata lain, dalam basis akrual suatu transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi sudah dicatat meskipun transaksi tersebut baru memiliki implikasi penerimaan kas atau pengeluaran kas di masa yang akan datang.

***PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA***

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut setiap entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menerapkan SAP Berbasis AkruaI dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, semua pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP PP nI 7 Tahun 2010.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis AkruaI dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP Berbasis AkruaI, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.

Tujuan utama penerapan SAP Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) bagi para pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat berbagai keputusan terhadap suatu entitas pemerintah daerah.

Dari segi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi berbasis akruaI dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Hal itu disebabkan karena dalam akuntansi berbasis akruaI seluruh beban yang terjadi baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar dicatat dan diakui. Dengan demikian akuntansi berbasis akruaI dapat menghasilkan perhitungan biaya pelayanan publik yang lebih wajar. Pada sisi yang lain, akuntansi berbasis akruaI juga dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Hal itu disebabkan karena akuntansi berbasis akruaI dapat menyediakan informasi tentang penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya serta menyajikan pengungkapan kewajiban di masa yang akan datang (KSAP, 2006).

Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dikarenakan banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan laporan akuntansi yang disusun oleh entitas-entitas atau badan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dapat mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang nantinya akan dijadikan sebagai faktor penentu kebijakan keuangan dan alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi yaitu melalui sistem pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Aset tetap negara merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pada umumnya nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, manajemen aset negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas

**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA**

pengelolaan aset tetap negara harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Manajemen Aset Negara yang merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Lembaga Manajemen Aset Negara berperan dalam hal memberikan pelayanan pengelolaan aset (khususnya properti) kepada publik baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal, dan akuntabel; meningkatkan status aset (fisik dan legal) guna menambah nilai aset. Maksimalisasi PNBPN melalui pemanfaatan aset dan membantu pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual yaitu tidak dilakukannya penyusunan laporan keuangan secara komprehensif sehingga menyebabkan terjadinya (1) Pencatatan aset yang tidak akurat (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset yang belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

Persoalan aset negara termasuk salah satu permasalahan bangsa yang serius dan perlu segera ditangani. Ketidakjelasan dalam pengelolaan aset negara menyebabkan apa yang disebut dengan *information asymmetry* atau kesenjangan informasi. Kondisi ini mengakibatkan para Menteri, terutama Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara, atau Pimpinan Lembaga tidak mengetahui jumlah, lokasi, dan status asetnya.

Hal tersebut mengakibatkan dua hal yaitu timbulnya *adverse selection problem* atau pengambilan keputusan yang tidak optimal dan moral hazard atau perlakuan yang menyimpang. (www.djkn.kemenkeu.go.id). Jika dicermati, penyalahgunaan aset milik negara terjadi hampir di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pelaku yang beragam mulai dari pegawai dan pejabat yang masih aktif hingga non aktif bahkan sampai sekelas menteri. Apabila diamati, kejadian ini telah berlangsung selama puluhan tahun bahkan bisa dikatakan sejak zaman Indonesia merdeka. Jenis penyalahgunaannya pun beragam mulai dari dimiliki untuk kepentingan pribadi, disewakan ke pihak ketiga secara ilegal, bahkan ada yang dijual.

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

Maraknya kasus korupsi terkait aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian internnya masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Seluruh komponen SPI pemerintah (menurut PP No. 60 Tahun 2008) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai.

Berdasarkan pada beberapa fenomena masalah di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masih kurang efektifnya peran dari Lembaga Manajemen Aset Negara dalam proses pengawasan terhadap berbagai lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam menjaga aset negara. Berdasarkan pada beberapa permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akural dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara”**.

Akuntabilitas Kinerja

Menurut (Martani, 2018), laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Menurut (Ulum, 2017), akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas (*accountability*) secara harafiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban.” Menurut (Sujarweni, 2018), mendefinisikan akuntabilitas adalah suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.” Menurut (Mahsun et al 2018), Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik

Indikator Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2019), adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*).
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal

Menurut (Rambe dan Rasdianto, 2018) sistem akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Akuntansi basis akrual merupakan proses pencatatan/pembukuan pada saat transaksi terjadi tanpa memperhatikan kas diterima atau di bayarkan hal ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pencatatan (Halim, 2019).

Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Menurut (Nunuy, 2016) Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Menurut (Halim dan Kusufi, 2014) sistem akuntansi berbasis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan

Indikator Akuntansi Berbasis Akruwal

Menurut (Halim, 2018) indikator akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut :

1. Penyajian dan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
2. Penyajian informasi lengkap mengenai pos-pos dalam laporan keuangan
3. Pertanggungjawaban pengelolaan dana.
4. Pengelolaan asset, kewajiban, dan modal

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017) pengendalian intern diharapkan dapat menciptakan aktivitas pengendalian yang efektif dan efisien dalam menentukan persediaan yang optimal dimiliki oleh perusahaan, mencegah tindakan pelanggaran dan penyelewengan yang bisa merugikan perusahaan, serta memberikan pengamanan fisik terhadap persediaan dari pencurian dan kerusakan. Pengertian tentang pengendalian intern beraneka ragam, walaupun dari masing-masing definisi tersebut memiliki inti yang sama. Sedangkan menurut Hery (2019) pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan

**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA**

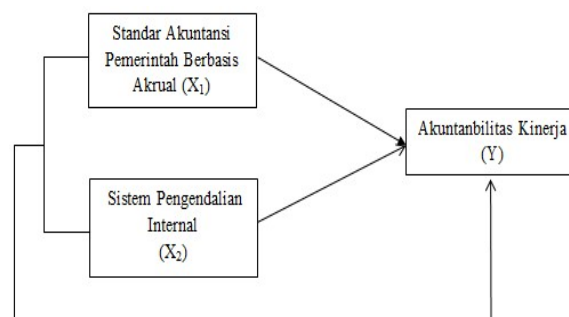
perusahaan. Defenisi lainnya menyebutkan bahwa pengendalian internal (Internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Indikator Sisten Pengendalian Internal

Menurut Supriyono (2022) terdapat 5 indikator pengendalian internal, yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Tujuan entitas dan risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi
5. Aktivitas

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berlandaskan pada pemaparan rumusan permasalahan, berikut hipotesis dari penelitian:

1. Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
3. Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2019), yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sample dan pupulasi penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif/bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah ASN di Lembaga Manajemen Aset Negara sebanyak 119 pegawai. Menurut Sugiyono (2019) jika jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka jumlah sampelnya dapat menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel menjadi 92 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA**

Uji Validitas

Menurut (Sugiono, 2019) “Jika data yang dikumpulkan dan informasi yang ditemukan dalam artikel yang diteliti ada kemiripan, maka temuan penelitian tersebut sah”.

Tabel 5. Uji Validitas Data

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Corelation	r-mean	Hasil
Standar Akuntansi Berbasis Akrual (X ₁)	X _{1.1}	0.409	0,3	Valid
	X _{1.2}	0.581		Valid
	X _{1.3}	0.494		Valid
	X _{1.4}	0.499		Valid
	X _{1.5}	0.514		Valid
	X _{1.6}	0.644		Valid
	X _{1.7}	0.499		Valid
	X _{1.8}	0.614		Valid
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	X _{2.1}	0.449	0,3	Valid
	X _{2.2}	0.551		Valid
	X _{2.3}	0.436		Valid
	X _{2.4}	0.549		Valid
	X _{2.5}	0.652		Valid
	X _{2.6}	0.512		Valid
	X _{2.7}	0.485		Valid
	X _{2.8}	0.517		Valid
	X _{2.9}	0.434		Valid
	X _{2.10}	0.357		Valid
Akuntabilitas Kinerja (Y)	Y.1	0.351	0,3	Valid
	Y.2	0.364		Valid
	Y..3	0.696		Valid
	Y.4	0.725		Valid
	Y..5	0.707		Valid
	Y.6	0.658		Valid
	Y.7	0.636		Valid
	Y.8	0.501		Valid

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Data yang dikumpulkan melalui angket harus diuji agar hasil penelitian dapat merepresentasikan hasil penelitian secara objektif. Pengujian data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan melakukan uji validitas dengan mengacu pada nilai cronbach's alpha yang tidak boleh kurang dari 0,3 maka data layak dianalisis.

Uji Reliabilitas (Kehandalan)

Uji ini dimaksudkan guna mengukur konsistensi internal dari sebuah instrumen pengukuran data yang diteliti.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Standar Akuntansi Berbasis Akrual (X ₁)	0,809	8
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0.812	10
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,842	8

Sumber Output SPSS 25 (2025)

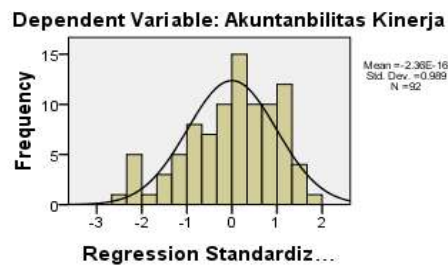
**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA**

Melihat hasil keluaran SPSS dapat dilihat bahwasanya nilai Cronbach's Alpha setiap variabel besarnya melebihi ($>0,60$). Dengan demikian, diasumsikan bahwasanya pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat diandalkan atau diharapkan dapat diandalkan. dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan guna menguji dan memastikan data yang diteliti telah terdistribusi secara normal sehingga layak sebagai data yang dianalisis.

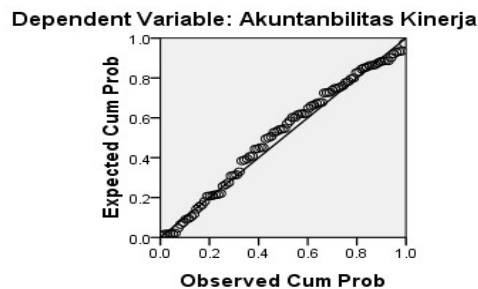
Histogram



Gambar 2. Uji Histogram

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Gambar 2 ialah temuan uji asumsi histogram menunjukkan bahwa informasi tersebut tersebar secara teratur, yang mana gambar histogramnya mempunyai garis yang membingkai lonceng dan terdapat cembung yang cukup di tengahnya.



Gambar 3. Uji PP Plot

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Gambar 3 ialah hasil uji normalitas data dengan mempergunakan PP Plot, cenderung terlihat fokus informasi tersebar dari sudut ke sudut sehingga informasi tersebut beredar.

Tabel 7. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.73749258
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.052
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.682
Asymp. Sig. (2-tailed)		.741

a. Test distribution is Normal.

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Lihat uji tes Kolmogorov Smirnov, nilai Asymp sig menunjukkan 0,42 yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya informasi disampaikan secara teratur, dimana nilainya melebihi 0.05 ($p= 0.741 > 0.05$).

Uji Multikolinieritas

Uji ini dalam model regresi dimaksudkan guna mendeteksi ada atau tidak hubungan linear yang kuat antar variabel independen (prediktor).

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

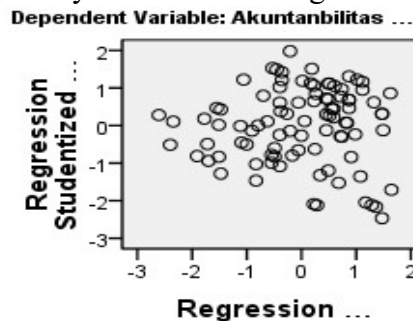
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Standar Akuntansi Berbasis Akrua (X ₁)	.998	1,002
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	.998	1,002

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Berdasarkan informasi pada tabel 8, terlihat bahwa nilai ketahanan semua faktor otonom adalah seperti nilai yang telah ditentukan, yakni 0,1, dan nilai VIF dari semua faktor bebas ialah seperti nilai yang telah ditentukan, yakni 10 , jadi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini ditujukan guna melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi.



Gambar 4. Uji Heterokedesitas

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Gambar 4 memperlihatkan bahwasanya fokus berikutnya tersebar sembarangan dan tidak membingkai contoh atau garis pola tertentu. Hasil ini menyatakan bahwasanya model relaps ini terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda ialah metode analisis statistik yang ditujukan guna meneliti korelasi antar satu variabel dependen (terikat) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas).

**Tabel 9. Regresi Linier Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	4.116	4.297	
	Standar Akuntansi Berbasis Akrua (X ₁)	0.327	0.098	0.301
	Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0.382	0.084	0.413

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Berlandaskan Tabel 9, berikut adalah persamaan Regresi Linear Berganda yang dirumuskan:

$$Y = 4,116 + 0,327 X_1 + 0,382 X_2$$

Nilai konstan sebesar 4,116 artinya nilai akuntabilitas kinerja sebesar 4,116 dengan nilai korelasi antara standar akuntansi berbasis akrual dengan akuntabilitas kinerja yakni 0,327 dan nilai korelasi antara variabel sistem pengendalian internal dengan nilai akuntabilitas kinerja yakni 0,382. Korelasi atau pengaruh yang paling dominan yaitu pada variabel sistem pengendalian internal.

Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)

Uji ini ditujukan guna menilai signifikansi pengaruh setiap variabel independen (prediktor) terhadap variabel dependen secara individual dalam model regresi

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.116	4.297		0.958	0.341
Standar Akuntansi Berbasis Akrua (X ₁)	0.327	0.098	0.301	3.324	0.001
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0.382	0.084	0.413	4.554	0.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber Output SPSS 25 (2025)

- Hasil pengujian untuk variabel standar akuntansi berbasis akrual menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,324 > t_{tabel} sebesar 1,98 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05, maka hipotesis H₁ diterima dan H₀ ditolak, artinya bahwa standar akuntansi berpengaruh

PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

2. Hasil pengujian untuk variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $4,554 > t_{tabel}$ sebesar 1,98 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka hipotesis H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	758.263	2	379.132	16.521	.000 ^a
	Residual	2042.389	89	22.948		
	Total	2800.652	91			

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Akrual dan Sistem Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Uji hipotesis simultan atau uji F membuktikan bahwa nilai dari F hitung sebesar 16,521 yang lebih besar dari 3,10 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima dan hipotesis 0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Uji R² (Determinasi)

Ukuran seberapa cocok (*goodness of fit*) garis regresi dengan data disebut koefisien determinasi atau yang sering dikenal dengan R-squared atau R². Dalam model regresi, besarnya variabel independen dapat menerangkan varians variabel dependen dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Berikut tabel hasil koefisien determinasi:

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.271	.254	4,790

a. Predictors: Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber Output SPSS 25 (2025)

Tabel 12 memperlihatkan nilai *adjusted R Square* 0,254 yang berarti variabel disiplin kerja dapat akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal dapat menjelaskan akuntabilitas kinerja sebesar 25,4%. Sedangkan, 74,6% diuraikan oleh variabel lainnya yang tidak dikutsertakan di penelitian ini

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari uji hipotesis dengan nilai t_{hitung} sebesar $3,324 > t_{tabel}$ sebesar 1,98 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$,

maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Arah positif menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dengan kata lain ketika ada peningkatan akuntansi berbasis akrual dengan indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Riyani dan Widajantie, 2022) yang menyatakan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari uji hipotesis dengan nilai t_{hitung} sebesar $4,554 > t_{tabel}$ sebesar $1,98$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka hipotesis H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara

Arah positif menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dengan kata lain ketika ada peningkatan akuntansi berbasis sistem pengendalian internal dengan indikator lingkungan pengendalian, tujuan entitas dan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan aktivitas akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Puturani, 2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

3. Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari uji hipotesis dengan nilai dari F hitung sebesar $16,521$ yang lebih besar dari $3,10$ dan nilai signifikan sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima dan hipotesis 0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Arah positif menggambarkan bahwasanya implementasi standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Temuan penelitian ini selaras dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal secara simultan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara

Kesimpulan

1. Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.
3. Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Saran

1. Lembaga Manajemen Aset Negara menyelenggarakan pelatihan kepada pegawai agar memahami prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dengan menyelenggarakan workshop berkala untuk memperbarui pengetahuan pegawai tentang perubahan regulasi dan praktik terbaik. Pilih perangkat lunak akuntansi yang mendukung akuntansi berbasis akrual dan sesuai dengan kebutuhan lembaga manajemen aset negara agar proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Lembaga Manajemen Aset Negara menyelenggarakan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk meminimalkan kesalahan dan penipuan dengan melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi. Tetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur efektivitas operasional dan pengendalian internal dengan melakukan pemantauan secara rutin dan audit harus mencakup pemeriksaan terhadap kepatuhan, keakuratan laporan keuangan, dan efisiensi operasional.
3. Lembaga Manajemen Aset Negara harus dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aset. Libatkan auditor eksternal untuk memberikan perspektif independen dan objektif. Libatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam pengawasan pengelolaan aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afiyah, Nunuy Nur. 2016. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana: Jakarta.
- Dwi Martani. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ihyaul Ulum, 2017. *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi. Edisi ke-3*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 65144.
- Logos. (2017) *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)*.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Ssektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.

**PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKURAL DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA**

- Manullang, S. B., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal , Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 4No. 1, 62–73.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mulyadi. (2019). *Akuntansi Manajemen Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat
- Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akural Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Putra, I Made Yoga Darma, DKK, 2019, “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”, *EJurnal Akuntansi*, Vol 28, ISSN 2302-8556
- Puturani (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas
- Rahmi, R. A., Supriyanto, T., & Nugrahaeni, S. (2022). Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z pada Reksadana Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–14.
- Riyani dan Widajantie (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ,Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010
PP No. 60 Tahun 2008
(www.djkn.kemenkeu.go.id).